
PELUANG DAN INTERVENSI PENGEMBANGAN DESA WISATA BAHARI DI KABUPATEN SERANG

Rahmawati Allyreza^{1*}, Rahmi Winangsih²

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹²

Abstract

Village Tourism is currently a prima donna destination to release fatigue and find a new atmosphere in traveling. Especially with the COVID-19 pandemic, the level of tourist visits to tourist villages has increased dramatically. Wargasara Tourism Village on Tunda Island is a tourist village in Serang Regency with maritime potential. Wargasara Tourism Village on Tunda Island has great potential to be developed but experiences obstacles related to infrastructure facilities, understanding of tourism by the community, and weak local government support. To overcome these obstacles, an analysis of opportunities and interventions in the development of Wargasara tourism village with marine potential is needed. The research method used is qualitative with a literature review (using references to Springer, Science Direct, and Scopus articles) and in-depth interviews with objective informants. This research provides another picture of the opportunities and interventions for developing tourist villages with marine potential from the study of public administration using the dimensions of governance, namely institutions, values, and processes. Improving and strengthening the governance of Wargasara tourism village is expected to answer the challenges faced in maximizing the potential of marine tourism in Serang Regency.

Keywords:

Internal communication, External Communication, Waste Management

Abstrak

Wisata Desa saat ini menjadi destinasi primadona untuk melepas penat dan mencari suasana baru dalam berwisata. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, tingkat kunjungan wisatawan ke desa wisata meningkat drastis. Desa Wisata Wargasara di Pulau Tunda merupakan desa wisata di Kabupaten Serang yang memiliki potensi bahari. Desa Wisata Wargasara di Pulau Tunda memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan namun mengalami kendala terkait sarana prasarana, pemahaman masyarakat terhadap pariwisata, dan lemahnya dukungan pemerintah daerah. Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan analisis peluang dan intervensi pengembangan desa wisata Wargasara yang memiliki potensi bahari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tinjauan literatur (menggunakan referensi artikel Springer, Science Direct, dan Scopus) dan wawancara mendalam dengan informan yang obyektif. Penelitian ini memberikan gambaran lain mengenai peluang dan intervensi pengembangan desa wisata dengan potensi bahari dari kajian administrasi publik dengan menggunakan dimensi tata kelola yaitu institusi, nilai, dan proses. Perbaikan dan penguatan tata kelola desa wisata Wargasara diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi dalam memaksimalkan potensi wisata bahari di Kabupaten Serang.

Kata kunci: Komunikasi internal, komunikasi eksternal, pengelolaan sampah

Article history:

Submission May 23, 2023

Revision October 10, 2023

Accepted November 15, 2023

Published December 31, 2023

***Corresponding author**

Email: rahmawati@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Rekreasi atau berwisata merupakan aktivitas yang menyenangkan untuk dilakukan, baik secara perorangan, keluarga maupun berkelompok. Aktivitas pariwisata merupakan kegiatan mengunjungi destinasi wisata yang menarik. Destinasi wisata tersebut dapat berupa destinasi wisata alam maupun destinasi wisata buatan. Destinasi wisata alam terdiri dari keindahan alam pegunungan maupun lautan.

Tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia. Berbagai kebijakan dilakukan oleh badan kesehatan dunia (WHO) untuk mengurangi penularan dan penyebaran virus Covid-19 seperti pembatasan sosial dan pemakaian masker ketika keluar rumah. Pandemi covid-19 tersebut memukul seluruh sektor kehidupan masyarakat, termasuk juga sektor pariwisata. UNWTO sendiri terkait pandemic covid-19, merekomendasikan beberapa strategi mengelola krisis dan mitigasi dampak, memberikan stimulus dan mempercepat pemulihan serta mempersiapkan hari esok untuk sektor pariwisata. (Collins-Kreiner & Ram, 2021). Sementara itu Pemerintah Indonesia melalui Kemenparekraf telah menyusun kebijakan pariwisata *New Normal*. Pariwisata normal baru diartikan sebagai adaptasi kebiasaan berwisata dengan cara yang diartikan sebagai kenormalan baru selama pandemic covid-19. (Maharani & Mahalika, 2020).

Kebijakan lain adalah Pemerintah pusat menggaungkan kampanye tagar *#DiIndonesiaAja* yang bertujuan agar masyarakat Indonesia lebih memilih berwisata di dalam negeri saja. (Maharani & Mahalika, 2020). Strategi lain yang dilakukan pemerintah adalah mengalihkan pariwisata massal (*mass tourism*) ke arah wisata alternatif (*alternative tourism*) sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Salah satu trend yang muncul di masa pandemi ini yaitu meningkatnya minat wisatawan untuk berwisata di alam terbuka. Desa wisata menjadi primadona di tengah pandemi. Selain karena alamnya yang menyuguhkan keindahan, wisatawan juga lebih memilih destinasi yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya dan tidak terlalu ramai. Berdasarkan survey Kemenparekraf pada Desember 2021 menemukan bahwa desa wisata paling diminati wisatawan di saat pandemi dengan angka 44% (Kemenparekraf, 2022)

Secara typologi, desa wisata terbagi menjadi 4 kategori yaitu desa wisata berbasis sumber daya alam, desa wisata berbasis sumber daya budaya lokal, desa wisata kreatif dan desa wisata kombinasi (Kemenparekraf, 2021). Desa wisata berbasis keunggulan sumber daya alam antara lain pegunungan, lembah, sungai, pantai, danau dan berbagai keunikan sumber daya alam lainnya. Desa wisata berbasis sumber daya kelautan atau pantai disebut desa wisata bahari atau Dewi Bahari.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam pengembangan destinasi wisata bahari. Pulau-pulau kecil dengan keindahan alam pantai maupun pesona bahwa laut dapat dikembangkan menjadi desa wisata bahari. Daya tarik wisata bahari dan pesisir Indonesia terletak pada kekayaan biodiversitas baharinya yang

menarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Luas terumbu karangnya diperkirakan mencapai 50.875 km², mewakili sekitar 18 persen terumbu karang dunia. Situs Coral Triangle yang dimiliki oleh enam negara tetapi sebagian besar wilayahnya berada di wilayah Indonesia, mengandung 76 persen spesies terumbu karang dunia dan 37 persen spesies ikan terumbu karang dunia (Bappenas, 2021). Berdasarkan data tersebut, maka potensi pengembangan desa wisata bahari sangat besar.

Desa wisata dimaknai sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, Wiendu. 1993). Desa memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang berbasis komunitas dan berlandaskan pada kearifan lokal kultural masyarakatnya dan juga dapat sebagai pemicu peningkatan ekonomi yang berprinsip gotong royong dan berkelanjutan.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/Permen-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari disebutkan bahwa Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut. Sedangkan Desa Wisata Bahari yang selanjutnya disebut Dewi Bahari adalah kawasan yang mempunyai potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan menjadi lokasi Wisata Bahari (Perikanan, 2020).

Indonesia memiliki 20 wisata bahari yang terkenal dengan keindahan wisata bawah lautnya, yaitu Labuan Bajo, Pulau Pahawang, Pulau Pramuka, Pulau Dolphin, Pulau Putri, Bunaken, Kepulauan Derawan, Gili Trawangan, Raja Ampat, Pulau Sepa, Wakatobi, Pantai Ngalmor, Kepulauan Mandale, Pulau Kapoporay, Pulau Rote, Pantai Blanakan, Taka Bonerate, Pulau Midi, Pulau Lancang dan Pulau Bintara (liputan6.com)

Permen KP RI No. 25/Permen-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015–2019, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa laut adalah masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipungungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Yulius et al., 2018).

Namun demikian, (Talib et al., 2022) menyebutkan bahwa dalam tiga abad tata kelola kelautan di Indonesia menemukan bahwa tata kelola kelautan yang melibatkan nilai-nilai masyarakat lokal dan lingkungan terbukti sulit di Indonesia, dan lebih luas lagi di negara-negara pascakolonial lainnya di mana lembaga tata kelola kelautan formal didirikan untuk memfasilitasi penangkapan sumber daya dan komodifikasi. Oleh karena itu, saat ini Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Nawacita Presiden Jokowi

menjanjikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pengelolaan sumber daya alam kelautan termasuk didalamnya potensi wisata bahari dilakukan untuk mencapai pembangunan kelautan berkelanjutan dan konsep *blue economy*. Tujuan dari *blue economy* adalah meningkatkan efisiensi sumber daya alam dan nilai ekonomi tanpa limbah untuk kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan keragaman aktivitas ekonomi yang bernilai tambah dan yang berdaya saing dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Serang merupakan wilayah pemerintah di Provinsi Banten yang memiliki 22 desa wisata dan sebagai daerah terbanyak dengan desa wisata. Salah satu desa wisata yaitu Desa Wargasara yang terletak pada sebuah pulau dan dikenal sebagai Pulau Tunda. Keindahan bawah laut dan potensi perikanan Pulau Tunda menjadi daya tarik masyarakat untuk mengunjungi pulau dan berwisata. Collins (2007) memberikan gambaran mengenai pariwisata bahari bahwa istilah tersebut merupakan bagian dari pariwisata berbasis alam (*nature-based tourism*). Menurut Collins, kegiatan *tour* dengan melihat pemandangan alam dan budaya serta aktifitas pemancingan merupakan contoh dari pariwisata bahari. Pariwisata bahari difokuskan pada pemanfaatan wilayah pesisir atau pantai dan penggunaan air/laut (wilayah maritim) sebagai unsur utama dari jenis wisata tersebut.

Hasil penelitian (DLHK Provinsi Banten, 2015) menyatakan bahwa permasalahan Pulau Tunda dari lingkungan fisik perairan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan pasir, permasalahan akibat kegiatan wisata yang belum ramah lingkungan, permasalahan akibat berbagai bentuk pencemaran dari daratan, permasalahan ekonomi masyarakat, permasalahan sosial dan budaya yang berimplikasi kepada aktivitas yang bersifat mengganggu kelestarian sumberdaya serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang merupakan salah satu faktor yang menghambat pengembangan aktivitas perekonomian di wilayah Pulau Tunda.

Selanjutnya (Sulistian, 2016) menyebutkan keindahan bawah laut Pulau Tunda cukup besar untuk dikembangkan dengan jarak tempuh yang tidak jauh dari pusat kota Serang, akan tetapi menghadapi kendala terkait kualitas sumber daya manusia dengan sadar wisata yang masih rendah, kesadaran lingkungan yang masih rendah dengan sampah akibat aktivitas wisata di pinggir pantai serta ancaman kerusakan trumbu karang dan vegetasi laut akibat aktivitas pariwisata yang belum berdasarkan pembangunan wisata berkelanjutan.

Artikel-artikel penelitian yang membahas tentang Pulau Tunda termasuk pariwisata di Pulau Tunda lebih banyak dari prespektif/sudut pandang manajemen (Prameswara & Suryawan, 2019); (Umam, 2019); (Umam & Novianti, 2021); , perikanan dan kelautan (Setyahandani et al., 2021); (Dedi et al., 2016);, lingkungan dan ekologi sosial (DLHK Provinsi Banten, 2015); (Alkhudri et al., 2019), dan Pemberdayaan Masyarakat (Rachman, 2016); (Umam et al., 2022) (Rahmadhar et al., 2021). Berdasarkan paparan

diatas, penelitian yang berkaitan dengan kelembagaan desa wisata WargaSara atau yang lebih dikenal sebagai Pulau Tunda belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran peluang dan intervensi pengembangan Desa Wisata Bahari Pulau Tunda dari perspektif kajian administrasi publik, terutama tata kelola desa wisata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan literatur review dengan pencarian tema artikel terindeks scopus yaitu peluang dan intervensi pengembangan desa wisata bahari di Indonesia. Selain itu, juga penelusuran pustaka melalui google untuk penelitian tentang Pulau Tunda. Wawancara mendalam pada informan yang dipilih (purposive informant) dilakukan untuk memperkuat kajian literatur tersebut. Informan penelitian yaitu sekretaris Desa WargaSara, Pulau Tunda, ketua Pokdarwis Pulau Tunda, agen perjalanan wisata di Pulau Tunda dan bidang destinasi wisata Disporpar Kabupaten Serang.

HASIL DAN DISKUSI

Secara administratif, Pulau Tunda berada di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dengan luas wilayah 275,5 Ha dengan nama pemerintahan Desa WargaSara yang terbagi menjadi 2 kampung Barat dan Timur. Jumlah penduduk Desa WargaSara sebanyak 456 Kepala Keluarga, dengan jumlah 300 rumah.

Untuk melakukan penyebarang ke Desa WargaSara Pulau Tunda terdapat dua alternatif yaitu dapat menggunakan kapal reguler dengan jadwal pemberangkatan hari Senin, Rabu dan Sabtu dengan jadwal jam 2 siang dari Pelabuhan Karangantu dan jam 7 pagi dari Pulau Tunda. Selain itu, dapat pula menyewa kapal setempat yang biasanya banyak disewakan.

➤ Penelusuran Artikel dengan tema Peluang dan Intervensi Pengembangan Desa Wisata Bahari di Indonesia

Penelusuran pustaka/artikel ilmiah sesuai dengan tema diatas dilakukan dengan menggunakan science direct dan diperoleh 330 artikel dengan jumlah terbitan tahun 2022 dan 2021 sebanyak 32 paper, diikuti tahun 2017 sebanyak 24 paper. Untuk jenis artikel berdasarkan hasil penelitian sebanyak 186, book chapter 61, review artikel sebanyak 32 buah dan conference abstrak sebanyak 20 buah.

Publikasi artikel tersebut terdapat pada beberapa jurnal sebagai berikut Ocean and Coastal Management (38), Marine Policy (33); Fuel and Energy Abstracts (13), Journal of Environmental Management (11), World Development (8), Marine Pollution Bulletin (7), Environmental Science & Policy (7), International Journal of Disaster Risk Reduction (7), Landscape and Urban Planning (6), Global Environmental Change (6), Ecosystem

Services (5), Tourism Management (4), Land Use Policy (4), Annals of Tourism Research (4), Science of The Total Environment (4), Advances in Parasitology (4), Cities (3), Journal of Rural Studies (3), Geoforum (3), Forest Policy and Economics (3), Journal of Marine and Island Cultures (3); The Extractive Industries and Society (3), Community-based Fisheries Management, 2020 (3) dan Science for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystems (SPICE), 2021 (3)

➤ **Peluang dan Intervensi Pengembangan Desa Wisata Bahari Desa Warga-sara Pulau Tunda**

Pulau Tunda memiliki pemandangan laut yang indah dan alami yang bisa menarik wisatawan untuk berkunjung. Pemandangan bentang alam merupakan parameter kualitas estetika yang terukur. Karena itu adalah suatu alasan utama bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah. Kualitas estetika adalah nilai suatu area dapat bergantung pada atributnya dan salah satu atribut dapat meningkatkan nilai suatu area. Area dengan tipe pantai berpasir dan berwarna putih dan pandangan kearah laut hamparan terumbu karang memiliki nilai estetika tertinggi, sedangkan zona yang memiliki nilai estetika rendah didominasi oleh vegetasi pantai estuari yaitu vegetasi mangrove (Legowo et al., 2019).

Hasil penelitian (Umam & Novianti, 2021) Pulau Tundra memiliki potensi yang signifikan untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata (TA) lebih lanjut untuk lingkungan alamnya dan budaya masyarakatnya, serta kemungkinan untuk mendirikan daya tarik wisata buatan berdasarkan tempat, area atau bangunan menarik yang ada. ditemukan di pulau itu. Selain itu, fasilitas dan fasilitas yang ada di pulau ini, meskipun masih kurang, dengan pengelolaan dan rencana pengembangan yang tepat dari pihak terkait, Pulau Tundra dapat lebih berkembang sebagai objek wisata di masa depan.

Pendapat senada disampaikan oleh (Setyahandani et al., 2021) bahwa Pulau Tunda memiliki kategori sesuai (S2) untuk kegiatan wisata pantai, mangrove, diving dan snorkeling dengan nilai kesesuaian wisata pantai sebesar 2,14, wisata mangrove 2, wisata diving 2,25 dan wisata snorkeling 2,43. Sedangkan daya dukung untuk setiap area wisata adalah wisata pantai 776 orang/hari, wisata mangrove 80 orang/hari, untuk wisata snorkeling 562 orang/hari, dan untuk wisata diving sebanyak 587 orang/hari, score total daya dukung untuk kawasan wisata sebesar 2005 orang/hari.

Pengembangan destinasi wisata juga bergantung pada besar kecilnya partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat diketahui dari bagaimana penerimaan dan kepuasan masyarakat terhadap keberadaan pariwisata (wisatawan, industri pariwisata) di daerahnya. Sebagaimana (Rachman, 2016) menyatakan bahwa masyarakat memiliki harapan besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata di Pulau Tunda dan dapat menjadi sumber ekonomi baru selain bekerja sebagai nelayan. Selain itu, masyarakat Pulau Tunda juga tidak merasa khawatir akan dampak negatif

yang muncul dari aktivitas pariwisata di Pulau Tunda. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan Pulau Tunda sebagai destinasi wisata bahari di Kabupaten Serang.

Dukungan pemerintah daerah berperan penting dalam pengembangan desa wisata. Bentuk dukungan tersebut adalah dengan ditetapkannya Desa WargaSara sebagai desa wisata berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor 556/Kep.154-Huk.Disparapora/2021 tentang Desa Wisata. Desa wisata Pulau Tunda memiliki potensi wisata alam bahari, budaya, dan buatan. Wisata alam bahari menjadi daya tarik utama yang dapat dinikmati oleh wisatawan, seperti snorkling, diving, memancing, susur pantai, jungle trekking, dan wisata edukasi Konservasi terumbu karang, dan penanaman mangrove.

Potensi wisata bahari Pulau Tunda tidak terlepas dari kelemahan atau kendala yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata bahari tersebut. Berdasarkan hasil wawancara diketahui keterbatasan pengembangan desa wisata WargaSara dengan potensi wisata bahari antara lain keterbatasan sarana dan prasarana terutama pembangkit listrik dan jaringan komunikasi, keterbatasan anggaran dan keterbatasan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Serang.

Jarak tempuh yang harus dilalui wisatawan menuju Pulau Tunda sekitar 2 jam perjalanan laut dengan menggunakan kapal. Untuk aktivitas sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada sumber daya energi listrik berbahan diesel yang masih swadaya masyarakat. Hal ini menjadi salah satu penghambat pengembangan desa wisata bahari Pulau Tunda karena lampu penerangan hanya dapat dinikmati dari jam 18.00- 22.00. Untuk iuran swadaya masyarakat sendiri dalam penggunaan PLTD sebesar Rp 2 ribu sampai Rp 5 ribu per dua hari. Namun, tetap dinilai memberatkan bagi masyarakat mengingat sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

(Prameswara & Suryawan, 2019) dalam penelitiannya menyebutkan Pulau Tunda sebagai objek wisata bahari di Kabupaten Serang memiliki kekuatan berupa potensi alam bawah laut yang berbeda dengan pulau lain di Kabupaten Serang, selain itu Pulau Tunda memiliki peluang yang cukup besar untuk peningkatan kebutuhan wisata dan lokasi yang cenderung strategis. Namun Pulau Tunda memiliki kelemahan pada kualitas sumber daya manusia serta fasilitas pendukung pariwisata yang masih rendah dan sampah yang belum dikelola dengan baik. Sementara ancaman yang dihadapi Pulau Tunda saat ini adalah beroperasinya para penambang pasir dan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat.

Intervensi kebijakan dibutuhkan guna pengembangan desa wisata bahari khususnya Desa WargaSara Pulau Tunda dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman sadar wisata bahari berkelanjutan.

(Bahrul Ulumi & Syafar, 2021) hasil penelitiannya menyatakan bahwa dibutuhkan intervensi berbasis teknologi digital 4.0. hal ini dikarenakan komunitas millennial yang saat ini di dominasi oleh pemuda di Pulau Tunda memegang peranan penting dalam mempromosikan ekowisata di wilayahnya kepada publik, sehingga pondasi sosial ekonomi dapat diperkuat oleh komunitas tanpa mengancam kerusakan lingkungan yang membayakan penghidupan mereka di masa yang akan datang. Promosi pariwisata yang gencar dibuat oleh Pokdarwis Jala Wisata Pulau Tunda yang digencarkan melalui internet (website dan social media) memiliki pengaruh pada promosi ekowisata Pulau Tunda. Hasilnya adalah pengunjung banyak yang datang di akhir pekan (Sabtu atau Minggu) dan mereka menikmati paket wisata di laut lepas Selat Sunda. Internet telah memberi manfaat sebagai sarana komunikasi ini terus dikembangkan oleh komunitas dalam menjaring wisatawan dari luar pulau.

Intervensi lainnya adalah dalam bentuk pendampingan pada Pokdarwis dalam pembuatan paket pariwisata sebagaimana (Umam et al., 2022) melakukan pendampingan bagaimana membuat paket wisata alam pengemasan paket wisata untuk dipromosikan secara digital melalui twitter, instagram, facebook maupun website Pulau Tunda. Paket wisata jelajah tersebut dipromosikan satu hari dengan harga Rp 100.000/orang.

(Khairusy et al., 2023) melakukan pendampingan melalui metode Training of Trainer (ToT) dan Focus Group Discussion (FGD). Pelaksanaan Training of Trainer (ToT) dilakukan dengan metode pentahelix dengan kerjasama dari pemerintah, akademisi, pihak swasta, masyarakat dan media elektronik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan sadar wiiasta, mengembangkan potensi menjadi pemandu wisata lokal serta daya dukung anggaran dari sisi perencanaan program kerja pemerintah desa Wargasara agar pengembangan kawasan pesisir Desa Wargasara sebagai destinasi wisata.

➤ **Perancangan Peluang dan Intervensi Pengembangan Desa Wisata Bahari di Kabupaten Serang.**

Penelitian ini bertujuan agar peluang Desa Wargasara sebagai desa wisata dengan potensi wisata kelautan/bahari dapat dikembangkan lebih baik dan memperhatikan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki dari sudut pandang Administrasi Publik.

Terjadi pergeseran paradigma administrasi publik dari *Old Public Administration* sampai pada paradigma saat ini yaitu *governance*. *governance* atau tata kelola dimaknai sebagai bentuk : (Rhodes, 2007)

- 1) Adanya saling ketergantungan antar organisasi, dimana tata kelola pemerintahan melibatkan aktor non negara. Batas negara menjadi bias karena ada perubahan batas antara sektor publik dan swasta.

- 2) Faktor kebutuhan bertukar sumber daya menjadi pendorong interaksi antar anggota dan dilakukan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama.
- 3) Interaksi tersebut berakar pada kepercayaan dan diatur serta dinegosiasikan dan disetujui oleh anggota organisasi
- 4) Masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap negara, melainkan masyarakat melakukan self regulated/mengatur diri sendiri.

Sementara itu Dwiyanto (2008) menyebutkan *governance* atau tata kelola dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu dimensi kelembagaan yang berarti *governance* dipahami sebagai sebuah sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (*multistakeholder*), baik dari pemerintah maupun luar pemerintah. Dimensi kedua, adalah dimensi nilai yang menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan. Dan dimensi ketiga adalah dimensi proses, yaitu mencoba menjelaskan bagaimana berbagai unsur dan lembaga memberi respons terhadap berbagai masalah publik yang muncul di lingkungannya. Dalam dimensi proses, *governance* dipahami sebagai sebuah proses dimana para pemimpin dan inovator kebijakan dari berbagai lembaga dan organisasi yang ada di dalam dan di luar pemerintahan mengembangkan jaringan untuk mengelola proses kebijakan publik.

Dalam hal terkait dengan tata kelola pariwisata, Bramwell dan Lane (2011) mengusulkan bahwa tata kelola pariwisata adalah proses untuk menghasilkan tatanan sosial melalui regulasi dan mobilisasi aksi sosial di antara para pemangku kepentingan pariwisata. (Michael Hall, 2011)

Terkait tata kelola desa wisata di Indonesia, Kementerian Pariwisata melalui Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, mencoba menerapkan konsep kerjasama *Penta Helix*, yaitu upaya menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas, aktivitas, fasilitas, pelayanan pariwisata dengan memberikan keuntungan, manfaat pada masyarakat dan lingkungan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor bisnis/swasta, perguruan tinggi dan media massa yang disingkat menjadi *ABCGM* (*academic, bussiness, community, governmnet and media*)

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disusun perancangan peluang dari intervensi yang dapat dilakukan oleh Desa WargaSara sebagai desa wisata di Kabupaten Serang dalam kajian Administrasi Publik, yaitu :

Pertama, Kelembagaan. Peluang pengembangan desa wisata WargaSara sangat besar dengan adanya kelompok sadar wisata Jala Tunda. Pokdarwis merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk oleh warga yang memiliki kepedulian akan wisata. Peningkatan pemahaman dan kemampuan perangkat desa WargaSara untuk lebih memahami akan pariwisata, Sadar Wisata dan melakukan inovasi-inovasi desa yang berfokus pada wisata. Selain itu, secara kelembagaan, dibutuhkan intervensi dalam bentuk kolaborasi dan kerjasama antarstakeholder bentuk *pentahelix* dalam tata kelola desa wisata bahari Desa WargaSara Pulau Tunda.

Sebagaimana hasil penelitian (Nuraini et al., 2021) Kinerja kelembagaan merupakan elemen penting yang harus diperkuat oleh para pemangku kepentingan secara kolektif untuk menjawab tantangan pengembangan wisata bahari dengan lebih baik. Kekuatan kelembagaan suatu komunitas memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat setempat, yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan secara efektif dan menciptakan landasan pengelolaan.

Kedua, dimensi proses dalam tata kelola desa wisata dengan sumber daya alam kelautan/bahari menekankan pada pendekatan sustainable based tourism. Pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah untuk memastikan sumber daya alam dengan segala potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk generasi berikutnya.

Ketiga, dimensi nilai dalam tata kelola desa wisata yaitu dengan menekankan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik meliputi partisipasi, transparansi, responsibilitas dan responsivitas. Dengan prinsip tersebut diharapkan peluang pengembangan Desa Wisata Pulau Tunda dapat berjalan dengan baik serta memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Tata kelola desa wisata dengan potensi bahari yang dinilai berhasil adalah pengelolaan desa wisata di Pulau Nusa Penida, Bali. Dimana hasil penelitian menyebutkan bahwa partisipasi pelaku pariwisata dan masyarakat masih pasif, hanya mengandalkan income atau pemasukan dari wisatawan yang datang. Akan tetapi model pengelolaan desa wisata dilakukan secara berkelanjutan orientasi integrasi. Model ini bermakna desa wisata dengan potensi wisata bahari, dilanjutkan dengan orientasi kultural yaitu keberlanjutan dengan filosofi Tri Hita Karana dan orientasi bisnis dengan tujuan kesejahteraan masyarakat (Darsana et al., 2017)

SIMPULAN

Menjadi desa wisata dengan potensi bahari/kelautan tidak hanya mengandalkan keindahan alam kelautan semata, akan tetapi dibutuhkan penguatan tata kelola desa wisata dari dimensi kelembagaan (pemerintah desa dan Pokdarwis), membangun kolaborasi pentahelix untuk mengurangi kendala yang dihadapi terkait sarana dan prasarana, pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat tentang sadar wisata dan sapta pesona. Dan juga peningkatan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Serang terkait pengembangan desa wisata Wargasara. Diharapkan potensi wisata bahari Pulau Tunda dapat dinikmati oleh wisatawan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Wargasara Kabupaten Serang

REFERENSI

- Alkhudri, A. T., Islami, P. Y. N., Sylvi, & Anggi. (2019). Ekologi Sosial Pulau Tunda.
- Bahrul Ulumi, H. F., & Syafar, M. (2021). Pengembangan Ekowisata Pulau Tunda Berbasis Komunitas dalam Era Industri 4.0. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial*

- Budaya, 23(1), 118. <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1.p118-120.2021>
- Bappenas. (2021). *Blue Economy, Development Framework For Indonesian's Economic Transformation*.
- Collins-Kreiner, N., & Ram, Y. (2021). *National tourism strategies during the Covid-19 pandemic*. *Annals of Tourism Research*, 89, 103076. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103076>
- Darsana, I. W., Sendra, I. M., Adikampana, I. M., & Mahagangga, I. G. A. O. (2017). Model Pengelolaan Wisata Bahari Berkelanjutan di Pulau Nusa Penida , Kecamatan Nusa Penida. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(1), 10–16.
- Dedi, D., Neviaty, P. Z., & Taslim, A. (2016). Hubungan Parameter Lingkungan Terhadap Gangguan Kesehatan Karang di Pulau Tunda – Banten. *Jurnal Kelautan Nasional*, 11(2), 105–118. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkn/article/view/6112>
- DLHK Provinsi Banten. (2015). Laporan Akhir ; Kondisi Ekologis dan Oseanografi bagi Sosial Masyarakat Pulau Tunda. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten, 17–18.
- Dwiyanto, Agus. (2018). *Ilmu Administrasi Publik Di Indonesia, Mencari Identitas*. Gajah Mada University Press
- Kemenparekraf. (2021). Pedoman Desa Wisata. 1 s.d 96. <https://www.ciptadesa.com/2021/06/pedoman-desa-wisata.html>
- Kemenparekraf. (2022). *Buku Tren Pariwisata 2022 2023*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
- Khairusy, M. A., Ferial, L., & Atmaja, S. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Edutourism dalam Peningkatan Masyarakat Pesisir Pulau Tunda , Banten. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat LPPM UNMA*, 8(1), 29–38.
- Legowo, M. S., Taofiqurohman, A., Pamungkas, W., & Subiyanto. (2019). Analisis Kesesuaian Wisata Pantai di Pulau tunda Kab Serang. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 10(2), 73–80.
- Maharani, A., & Mahalika, F. (2020). New Normal Tourism Sebagai Pendukung Ketahanan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi (New Normal Tourism As a Support of National Economic Resistance in the Pandemic Period). *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 8, 14. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/87>
- Michael Hall, C. (2011). *A typology of Governance and its Implications for Tourism Policy Analysis*. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 437–457. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.570346>
- Nuraini, Satria, A., Wahyuni, E. S., & Bengen, D. G. (2021). *Strengthening marine ecotourism management's institutional performance in Raja Ampat, Indonesia*. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 29(3), 1809–1829. <https://doi.org/10.47836/pjssh.29.3.18>

- Perikanan, K. K. dan. (2020). Permen KP No. 92/2020 tentang Desa Wisata Bahari. 3, 1–31.
- Prameswara, B., & Suryawan, I. B. (2019). Strategi Pengembangan Potensi Wisata Bahari Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(1), 180. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2019.v07.i01.p27>
- Rachman, A. F. (2016). Analisis Kepuasan Masyarakat Setempat Terhadap Kegiatan Pariwisata di Pulau Tunda Kabupaten Serang. 1–23.
- Rahmadhar, Y., Ibrahim, N., & Rachmat, G. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Pulau Tunda dalam Mengembangkan Potensi Alam Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pulau Tunda. *Jurnal Solma*, 10, 85–89. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/solma/article/view/1661>
- Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding governance: Ten years on. *Organization Studies*, 28(8), 1243–1264. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>
- Setyahandani, N. E., Yulianda, F., & Yulianto, G. (2021). Menentukan Potensi Sumberdaya dan Daya Dukung Ekowisata Pulau Tunda, Kabupaten Serang Banten. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 13(1), 71–80. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v13i1.34699>
- Sulistian, A. (2016). Pulau Tunda sebagai Daerah Tujuan Wisata Bahari Kabupaten Serang. *Skripsi*, 145.
- Talib, N. L., Utomo, A., Barnett, J., & Adhuri, D. S. (2022). *Three centuries of marine governance in Indonesia: Path dependence impedes sustainability*. *Marine Policy*, 143(June), 105171. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105171>
- Umam, C. (2019). Strategi Pengembangan Ekowisata Bahari Di Pulau Tunda. *Jurnal*, 2(1), 13–22.
- Umam, C., & Novianti, E. (2021). *Tunda Island As a Tourist Attraction in Tirtayasa District, Serang Regency*. *Jelajah: Journal of Tourism and Hospitality*, 3(1), 25–32. <https://doi.org/10.33830/jelajah.v3i1.1828>
- Umam, C., Yuslistyari, E. I., & Suharna, N. (2022). Pendampingan Penyusunan Paket Wisata Jelajah Kampung Pulau Tunda. *Jurnal Kuat; Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 135(4).
- Yulius, Y., Rahmania, R., Ramdhan, M., & Khoirunnisa, T. (2018). Kriteria Penetapan Zona Ekowisata Bahari (Issue September). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1412165>